

DINAMIKA PERAN TOKOH NON-STRUKTUR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMBANGUNAN DIDESA UMAMANU

Geniayu Rambu Ohal¹, Supardal²

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta^{1,2}

e-mail: geniayupulu@gmail.com, gusdal66@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran tokoh non-struktural dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa Umamanu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur. Tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar di dalam pemerintahan desa. Keberadaan mereka menjadi petunjuk utama dalam pengambilan keputusan, dan pembangunan. Tujuan penelitian yaitu menganalisis bagaimana peran tokoh non-struktural dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan dengan melihat cara mereka berinteraksi, dan berkolaborasi dengan pemerintah serta dampak nyata peran mereka terhadap partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yang bersifat studi lapangan dengan fokus pada kegiatan musyawara, interaksi antara tokoh non-struktural dan pemerintah desa serta masyarakat. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dualisme kekuasaan antara struktur pemerintah formal dan tokoh non-struktur, dimana legitimasi budaya yang di miliki tokoh non-struktur menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan program pembangunan desa Umamanu. Masyarakat lebih mendengarkan arahan tokoh non-struktural karena ikatan emosional, kultural, dan historis yang kuat.

Kata Kunci: *Tokoh Non-struktural, Pengambilan Keputusan, Pembangunan desa, Dualisme kekuasaan, Kearifan lokal*

ABSTRACT

This study discusses the role of non-structural figures in decision-making and development of Umamanu village, Lewa Tidahu District, East Sumba Regency. Traditional figures, religious figures, and community leaders have great influence in village government. Their existence is the main guide in decision-making and development. The purpose of the study is to analyze the role of non-structural figures in the decision-making and development process by looking at how they interact and collaborate with the government and the real impact of their role on community participation and sustainable development. This study uses a qualitative descriptive method, with a field study approach focusing on deliberation activities, interactions between non-structural figures and the village government and the community. With data collection techniques using observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that there is a dualism of power between the formal government structure and non-structural figures, where the cultural legitimacy of non-structural figures is the key to the success or failure of the Umamanu village development program. The community listens more to the direction of non-structural figures because of strong emotional, cultural, and historical ties.

Keywords: *Non-structural Figures, Decision Making, Village Development, Dualism of Power, Local Wisdom.*

PENDAHULUAN

Diberbagai desa, selain perangkat resmi, terdapat individu-individu yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Mereka sering disebut tokoh non-struktural

Copyright (c) 2025 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

karena perannya tidak tercatat secara formal namun nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh non-struktural adalah pemimpin informal yang memiliki pengaruh atas kehidupan sosial, bukan karena jabatan (Mubyarto, 1991). Tokoh-tokoh non-struktural ini bisa berupa tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat lainnya yang secara formal tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan desa. Namun didalam pengambilan keputusan mereka sering terlibat dan bisa menjadi penentu arah pembangunan dan tempat masyarakat bertanya atau bermusyawara. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan tindakan terbaik dari berbagai alternatif berdasarkan informasi dan tujuan tertentu (Robbins & Judge, 2001). Jadi pengambilan keputusan desa bukan hanya soal yang dipengaruhi, tapi juga melibatkan dinamika sosial yang dipengaruhi oleh tokoh non-struktural. Mereka sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat, karena pengetahuan, pengalaman, dan pengaruh sosial yang dimiliki.

Tokoh non-struktural membantu menyaring informasi membimbing arah keputusan, dan menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai lokal dan tujuan pembangunan desa. Pembangunan desa adalah proses peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh melalui partisipasi aktif masyarakat (Soetomo, 2011). Pembangunan desa tidak hanya bergantung pada struktur pemerintahan formal seperti kepala desa dan perangkatnya, tetapi juga dipengaruhi oleh peran aktor-aktor non-struktural informal yang memiliki pengaruh sosial ditengah masyarakat. Di berbagai desa di Indonesia keberadaan tokoh non-struktural seperti tokoh adat, tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat lainnya, terbukti memainkan peran yang signifikan dalam proses pembangunan desa. Fakta yang terjadi dilapangan dinamika peran tokoh non-struktural seringkali mempengaruhi proses pengambilan keputusan desa. Mereka mampu menggerakkan masyarakat, menjadi mediator konflik, sehingga mempengaruhi arah kebijakan atau pembangunan. Kondisi ini mencerminkan adanya relasi kekuasaan yang kompleks antara struktural formal dan informal dalam tatanan sosial desa. Dalam peran tokoh non-struktural ada perubahan-perubahan yang terjadi yang disebut dengan dinamika sosial, struktur sosial dan fungsi masyarakat tidak statis, melainkan terus bertransformasi melalui interaksi sosial berulang (Soekanto & Sulistyowati, 2006). Saat terjadi sebuah konflik atau krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, peran tokoh non-struktural mungkin menurun.

Berdasarkan hal tersebut, fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena keberadaan dan pengaruh tokoh non-struktural tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi desa, namun tetap eksis dan bahkan lebih dominan dibandingkan perangkat desa formal dalam pengambilan keputusan. Disisi lain mereka bisa menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, memperkuat legitimasi kebijakan, serta mempercepat pelaksanaan pembangunan. Namun disisi lain jika tidak dikelola dengan baik, kekuatan informal ini dapat menciptakan dualisme kekuasaan dan bahkan ketegangan dalam tata kelola desa. Dan juga proses pengambilan keputusan menjadi terhambat. Akibatnya, program pembangunan desa tidak berjalan secara optimal karena adanya Tarik-menarik kepentingan yang justru masyarakat. oleh karena itu, menjadi perhatian serius karena mengganggu stabilitas pemerintah, memicu konflik kepentingan, serta menghambat proses pembangunan secara efektif.

Di Desa Umamanu, teridentifikasi adanya keterlibatan aktif dari para tokoh non-struktural, seperti tokoh adat, pemuka agama, dan figur masyarakat yang disegani, dalam berbagai forum pengambilan keputusan strategis, termasuk musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangdes) dan pengelolaan kegiatan sosial kemasyarakatan. Keaktifan mereka, yang berlandaskan pada legitimasi kultural dan kepercayaan publik, seringkali secara signifikan menentukan arah akhir dari sebuah kebijakan, bahkan dalam beberapa kasus tampak lebih dominan ketimbang peran formal aparat desa. Fenomena ini mencerminkan adanya dinamika sosio-politik yang unik di tingkat lokal, di mana kekuatan informal bernegosiasi dan berintegrasi dengan struktur pemerintahan formal. Oleh karena itu, menjadi krusial untuk

memahami secara mendalam bagaimana peran tersebut dijalankan, mekanisme pengaruh mereka terhadap proses pengambilan keputusan, serta sejauh mana kontribusi nyata mereka dalam mengarahkan pembangunan desa yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan secara spesifik menggambarkan dan menganalisis secara mendalam dinamika peran para tokoh non-struktural dalam arena pengambilan keputusan dan implementasi pembangunan di Desa Umamanu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Tujuan utamanya adalah untuk membedah bagaimana peran tersebut dieksekusikan dalam praktik sehari-hari, khususnya dengan mengamati pola interaksi dan kolaborasi mereka dengan pemerintah desa. Penelitian akan mengidentifikasi apakah hubungan tersebut bersifat sinergis, komplementer, atau justru menimbulkan ketegangan dalam tata kelola desa. Lebih lanjut, analisis akan difokuskan pada dampak nyata dari pengaruh mereka terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan, tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam program desa, serta efektivitas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakar pada kebutuhan riil dan kearifan lokal masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi lapangan. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan dan menganalisis peran tokoh non-struktural dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan di Desa Umamanu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Fokus penelitian adalah pada interaksi selama musyawarah dan dinamika sosial lainnya. Subjek penelitian atau informan dipilih menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Informan kunci terdiri dari para tokoh non-struktural (seperti tokoh adat dan tokoh agama), aparatur pemerintah desa, serta beberapa perwakilan masyarakat. Pemilihan informan dari berbagai latar belakang ini bertujuan untuk memperoleh data yang kaya dan seimbang dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi non-partisipan dilaksanakan untuk mengamati secara langsung dinamika interaksi selama rapat desa atau kegiatan kemasyarakatan, dengan instrumen berupa catatan lapangan terstruktur. Wawancara mendalam semi-terstruktur dilakukan dengan seluruh informan untuk menggali persepsi, pengaruh, dan peran mereka dalam proses pengambilan keputusan, dengan berpedoman pada panduan wawancara. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder seperti profil desa, notulensi rapat, dan peraturan desa yang relevan. Dokumentasi ini berfungsi untuk memberikan konteks serta memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi di lapangan.

Data kualitatif yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini diawali dengan merangkum, memilih, dan mengkodekan informasi penting dari transkrip wawancara dan catatan lapangan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif atau matriks untuk memetakan pola-pola peran dan pengaruh para tokoh non-struktural. Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data antar-sumber (tokoh non-struktural, pemerintah desa, dan masyarakat) serta antar-metode (wawancara, observasi, dan dokumen) sehingga diperoleh kesimpulan yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data didalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap aktifitas tokoh non-struktural di desa Umamanu, kec. Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba timur, NTT, dalam konteks pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Observasi dilakukan untuk memahami bagaimana tokoh non-struktural ini berinteraksi dengan pemerintah desa dan masyarakat, serta bagaimana pengaruh sosial dan budaya, mereka berperan ditengah proses formal pemerintahan. Hasi dari penelitian ini adalah Peran Tokoh non-struktural masih kuat dalam masyarakat, keterlibatan non-struktur bersifat namun strategis, terdapat potensi dualisme kekuasaan, masyarakat lebih patuh kepada tokoh non-struktural. Hal tersebut terjadi karena Tokoh non-struktural memiliki kedekatan historis, emosional, dan kultural dengan masyarakat. Keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan bersifat informal namun memiliki strategis yang besar, terutama dalam menyukseskan program pembangunan desa Umamanu . hal ini menimbulkan potensi dualisme kekuasaan karena keberadaan mereka biasa di anggap lebih sah oleh masyarakat dibandingkan pemerintah desa yang resmi. Warga cenderung lebih patuh terhadap tokoh non-struktural, karena mereka dinilai lebih memahami kebutuhan dan aspirasi lokal. Akibatnya pemerintah kehilangan otoritasnya karena masyarakat lebih mendengar tokoh non-struktural, keputusan sering dibuat di luar forum resmi, sehingga tidak tercatat secara administratif dan rentan disalahgunakan oleh pihak tertentu, menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

Adapun beberapa pendapat dari beberapa informan yang peneliti melakukan wawancara yaitu

“Dalam kegiatan musyawarah kami mengundang beberapa tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan ada perwakilan dari setiap wilayah RT atau dusun, itu utusan dari masyarakat itu sendiri, masyarakat percayakan kepada mereka untuk ikut mewakilkan mereka dalam musyawarah desa maupun musdus. Dan dalam pelaksanaan pembangunan tokoh masyarakat juga terlibat membantu memantau proses pembangunan dan lainnya. Khususnya jika menyangkut pembangunan yang tentunya bersangkutan dengan nilai adat dan kepentingan dimasyarakat, dalam rapat mereka menyampaikan pandangan dan juga menyampaikan apa yang dibutuhkan masyarakat, dan dalam kegiatan di pemerintahan tokoh masyarakat sangat membantu untuk memberikan pengaruh kepada warga agar ikut berpartisipasi dan itu bagus menurut saya, Karena kendala kami itu susah ajak warga ikut terlibat, masyarakat mungkin sibuk dikebun, sawah dan lainnya.”



Gambar 1. Wawancara Yoel, Kaurpemerintah desa Umamanu

“dari saya sendiri terlibat karena menjadi perwakilan dari masyarakat juga, diundang oleh pemerintah desa untuk hadir dalam musyawarah dusun, musyawarah desa dan lainnya, dan saya sampaikan apa yang di butuhkan masyarakat dan saya juga melihat apa yang dibutuhkan masyarakat karena saya setiap hari berada dilingkungan masyarakat dan tinggal di sekitar itu

juga. Jadi saya tau apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan pembangunan di desa untuk lokasi kami diskusikan dulu karena takutnya lokasi itu masih bagian dari tana leluhur nenek moyang kami tanah ulayat, dan itu tidak boleh di gannggu jadi ya kami diskusikan dengan pemerintah. Dan bagian tanah itu kami percaya ada tanah yang bagus untuk bangun rumah dan lainnya dan ada juga yang tidak bagus misalnya bangun rumah tapi tanahnya lihat dan percaya tidak bagus maka kehidupan orang yang tinggal di rumah tersebut tidak aman.”



Gambar 2. wawancara dengan Bapak Darius, Tokoh masyarakat/tokoh adat

“Dari saya sendiri memang betul kadang kami dengar kepala adat karena lebih dekat, kepala adat pintar, punya banyak teman pejabat yang di atas dan tau kehidupan kami seperti apa, khususnya saya sendiri bisa bisa sampaikan apa saja ke kepala adat tanpa takut dan dari yang saya lihat kepala adat jika omong di percaya oleh pemerintah, namun saya lihat kepala adat, pemerintah dan warga lainnya kurang kompak dan terbuka sehingga ada beberapa yang kami sampaikan ke kepala adat mungkin lupa disampaikan kepada pemerintah sehingga tidak ada yang berjalan kegiatannya. bukan hanya kepala adat juga ada beberapa orang juga pada intinya yang pintar dan berani berbicara di depan umum dengan baik punya kenalan pejabat.



Gambar 3. wawancara dengan Yopi, masyarakat

Berdasarkan ketiga pendapat informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan tokoh non-struktural seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama di Desa Umamanu memiliki posisi yang kursial dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa. Mereka tidka hanya mewakili suara masyarakat dalam fórum musyawarah tingkat desa dan dusun, tetapi juga menjebatani aspirasi warga serta mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan pembangunan. Parah tokoh ini turut memastikan bahwa pembangunan tetapselaras dengan norma adat dan kepercayaan lokal, terutama dalam hal menyangkut tanah ulayat. Namun, masih terdapat kendala berupa kurangnya koordinasi dan transparansi antara tokoh adat pemerintah desa dan masyarakat ynag menyebabkan beberpa aspirasi tidak tersampaikan dengan baik dan berpengaruh pada tidak terlaksanannya program. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antar unsur formal dan informal agar pembangunan desa berjalan inklusif, berkelanjutan, dan menghargai nilai-nilai lokal.

Pembahasan

Peran tokoh non-struktur masih kuat dalam masyarakat dimana berdasarkan hasil observasi langsung di desa Umamanu, Kec. Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Copyright (c) 2025 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

menunjukkan bahwa tokoh-tokoh non-struktural seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang-orang tua yang dihormati masyarakat tetap memiliki central dalam kehidupan sosial. Kuatnya peran ini berakar dari nilai-nilai budaya dan struktur sosial lokal yang menempatkan tokoh tersebut sebagai figure moral dan symbol tradisi. Di desa Umamanu, ama adat dan tuan tanah masih memiliki pengaruh terhadap arah sosial dan budaya masyarakat. Faktanya sebelum mulainya pembangunan fisik seperti pembukaan lahan pemerintah desa tetap mendatangi tokoh adat untuk meminta restu, hal ini menunjukkan bahwa tokoh non-struktural tetap menjadi rujukan moral dan budaya masyarakat terutama dalam hal tanah ulayat, warisan leluhur, nilai adat. Tokoh adat dan tuan tanah dalam masyarakat komunal memiliki peran yang tidak tergantikan dalam mengatur hak atas tanah dan relasi sosial yang menyertainya (Lanur & Martini, 2015; Rohaedi et al., 2019; Suparmini et al., 2015; Titaley & Watloly, 2021). Pemerintah Formal seringkali harus kompromi dengan otoritas adat untuk mendapatkan legitimasi masyarakat (Wignjosebroto, 2002). Dari hal tersebut menegaskan bahwa tokoh-tokoh ini bukan hanya simbol budaya, tetapi juga pemegang kewenangan moral dan sosial diantara masyarakat, keberadaan mereka menjadi syarat agar kebijakan pemerintah dianggap sah dan diikuti oleh masyarakat.

Di desa Umamanu keterlibatan tokoh non-struktural dalam proses pengambilan keputusan bersifat informal namun memiliki strategi yang besar. meskipun tidak memiliki jabatan secara resmi, namun kehadiran mereka dalam forum informal seperti musyawarah adat, pertemuan keluarga besar atau diskusi pembangunan desa sangat berpengaruh. Mereka sering dimintai pendapat oleh pemerintah desa sebelum keputusan diambil. Dukungan mereka sangat didengar pemerintah. Kekuatan sosial seperti komunitas lokal, norma sosial, dan jaringan kepercayaan mampu mempengaruhi kinerja institusi formal (Ardiyasa & Rahayu, 2022; Hamzah & Ariana, 2024; Pujiningsih, 2019; Rijal et al., 2021). Dari pernyataan ini menegaskan bahwa tokoh non-struktural memegang legitimasi kultural yang tak kalah kuat dibanding pejabat desa formal, Tanpa dukungan mereka maka pelaksanaan kebijakan mengalami ketegangan.

Di Desa Umamanu terdapat dualisme kekuasaan dilapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, terdapat beberapa ketegangan antara pemerintah yang sah secara struktural dan tokoh non-struktural yang memiliki legitimasi kultural. Dualisme ini muncul ketika kepala desa mengambil keputusan tanpa konsultasi dengan tokoh-tokoh lokal yang dianggap pemilik suara masyarakat. Meka pembagunan desa terhambat karena tidak ada kesepakatan kedua pihak, muncul penolakan dari warga yang lebih mendengar tokoh non-struktural dairapa perangkat resmi. Oleh sebab itu, saat pemerintah desa Umamanu ingin mengadakan pembangunan desa, tanpa terlebih dahulu berdiskusi dengan tokoh non-struktural, sebagian warga akan menolak ikut kerja bakti. Hal ini mencerminkan ada dua pusat kekuasaan yang sama-sama diakui masyarakat, satu berdasarkan struktur pemerintahan, satu lagi berdasarkan kekuatan budaya tradisi dan hubungan sosial (Anggraeni & Hidayat, 2020; Suparmini et al., 2015). Dalam masyarakat lokal, bentuk perlawanan terhadap kekuasaan formal tidak selalu terbuka. Namun, muncul dalam bentuk pergeseran loyalitas, yang menunjukkan adanya kekuatan informal yang lebih diakui secara moral budaya. Dari pernyataan ini menyebutkan bahwa kekuasaan dan resistensi dalam masyarakat tidak selalu muncul dalam bentuk yang terang-terangan seperti pemberontakan atau protes. Di desa biasanya masyarakat agraris dan tradisional, perlawanan terhadap otoritas formal sering terjadi secara halus, diam-diam dan bersifat sehari-hari.

Masyarakat lebih mendengar tokoh non-struktural dibandingkan pemerinta desa salah satunya yaitu bahwa masyarakat cenderung lebih mematuhi dan mengikuti arahan tokoh non-struktural. Hal ini karena hubungan emosional, kekerabatan, dan budaya yang terjalin lama

Copyright (c) 2025 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

antara masyarakat dan tokoh tersebut. Sementara pemerintah desa dipandang sebagai institusi formal yang kadang dianggap jauh dari nilai lokal, justru yang hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu seperti urusan adat, urusan pernikahan, urusan kematian, urusan pembangunan dan penyelesaian sengketa adalah tokoh non-struktural. Faktanya pemerintah menghimbau kerja bakti dan lainnya jika tokoh non-struktural tidak hadir maka hanya sedikit warga yang hadir, masyarakat menganggap bahwa jika non-struktural tidak hadir berarti pekerjaan itu tidak bermanfaat bagi masyarakat, akan tetapi jika tokoh non-struktural hadir maka warga menganggap itu sah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh non-struktural memiliki kekuatan pengaruh yang lebih mengakar dalam kesadaran kolektif masyarakat dibanding struktur pemerintah formal.

Berbagai penelitian di berbagai daerah di Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa peran tokoh non-struktural masih sangat kuat dan strategis dalam proses pengambilan keputusan serta pembangunan desa. Studi di Kerinci, misalnya, menyoroti bagaimana lembaga adat tidak hanya dominan tetapi juga membentuk hubungan simbiosis dengan pemerintah desa, di mana keduanya saling memperkuat legitimasi dalam pengambilan keputusan (Yusuf & Effendi, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan di Desa Marindal, yang menegaskan bahwa hubungan baik dan pemahaman mendalam para pemimpin lokal terhadap aspirasi warga menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan (Hutasoit et al., 2024). Legitimasi sosial yang mereka miliki menjadikan mereka bukan sekadar simbol budaya, tetapi juga aktor penting yang memengaruhi dinamika sosial dan politik di tingkat desa.

Keterlibatan tokoh non-struktural ini tidak bersifat pasif, melainkan aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Penelitian di Jombang menggambarkan secara utuh bagaimana tokoh masyarakat hadir sejak awal untuk mengarusutamakan aspirasi warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), aktif mendampingi realisasi program melalui gotong royong, hingga memberikan umpan balik langsung dalam tahap evaluasi (Hidayatulloh & Yani, 2021). Peran fungsional ini juga terkonfirmasi dalam penelitian di Sinjai, di mana tokoh masyarakat bertindak sebagai fasilitator dialog, penggerak kerja bakti, dan bahkan mediator ketika terjadi konflik di tengah masyarakat (Hamdan et al., 2023). Mereka secara efektif menjadi jembatan antara pemerintah desa dan warga, memastikan program pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Meskipun demikian, berbagai studi ini juga mengungkap adanya sebuah tantangan yang sama, yaitu kesenjangan antara pengaruh informal yang besar dengan pengakuan dan dukungan formal yang minim. Penelitian di Sulawesi Barat secara eksplisit menyebutkan bahwa kurangnya sinergi antara pemimpin non-formal dan formal dapat menciptakan potensi hambatan dan konflik (Kartina & Idrus, 2023). Hal serupa ditemukan di Jombang dan Sinjai, di mana kekuatan pengaruh tokoh masyarakat seringkali tidak diimbangi dengan pemberdayaan anggaran atau dukungan kelembagaan yang memadai, sehingga peran mereka dalam keputusan strategis menjadi terbatas (Hidayatulloh & Yani, 2021; Hamdan et al., 2023). Tanpa adanya dukungan struktural, peran mereka menjadi rentan dan efektivitasnya tidak dapat dioptimalkan.

Dari paparan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran tokoh non-struktural seperti tokoh adat dan pemimpin non-formal bukan hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga memainkan fungsi aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan desa. Keterlibatan mereka terbukti mampu menciptakan legitimasi sosial yang kuat dan memperkuat partisipasi warga. Namun, dominasi atau peran penting mereka belum selalu diimbangi dengan pengakuan atau dukungan struktural dan anggaran dari pemerintah desa, sehingga berpotensi menimbulkan konflik atau keterbatasan dalam efektivitas pembangunan. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun sinergi

yang kuat antara tokoh non-struktural dan pemerintah desa melalui forum koordinasi, pelatihan, serta pengakuan peran dalam bentuk dukungan kelembagaan maupun anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinamika peran tokoh non-struktural dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di Desa Umamanu menunjukkan bahwa kekuasaan dalam masyarakat desa tidak semata-mata bersumber dari struktur formal, tetapi juga dari legitimasi kultural yang dimiliki oleh tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan figur masyarakat lokal. Toho-tokoh ini berperan bukan hanya sebagai pelengkap sosial, namun sebagai poros pengambilan keputusan yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Keberadaan mereka menjadi penentu sah dan tidak sahnya sebuah kebijakan di mata masyarakat, dan mereka juga mampu mengarahkan arah pembangunan dan keberhasilan partisipasi masyarakat. Hal ini, mencerminkan bahwa dalam masyarakat tradisional, struktur formal pemerintah sering berdialog dan berkompromi dengan struktur informal yang hidup dalam kesadaran kolektif.

Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan formal administratif, melainkan perlu mengintegrasikan nilai, norma, dan otoritas sosial yang hidup dalam masyarakat. Ketika tokoh non-struktural diabaikan, partisipasi masyarakat akan menurun kebijakan pembangunan bisa agagal. Oleh karena itu, dibutuhkan model kolaboratif antara pemerintah desa dan tokoh non-struktural melalui forum komunikasi yang terlembaga dan penguatan kapasitas kedua pihak. Kedepannya, hasil penelitian ini dapat dikembangkan melalui perumusan tata kelola desa yang mengintegrasikan kekuasaan formal dan non-formal secara harmonis. Dan dilakukan dengan kondisi sosial untuk membangun desa berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F. D., & Hidayat, R. (2020). Penguatan identitas sebagai strategi bertahan warga adat Sunda Wiwitan. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 2(2), 75. <https://doi.org/10.52483/ijsed.v2i2.27>
- Ardiyasa, G. G., & Rahayu, E. (2022). Implementasi kebijakan smart kampung di Kabupaten Banyuwangi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 712. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2863>
- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan anggaran pembangunan desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 1–21.
- Arsjad, M. F. (2018). Peranan aparat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1)¹, 16–32.
- Diwangga, D. G. (2021). *Pengembangan potensi desa oleh pemerintah desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*. E-Jurnal Inskripsi. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/862>
- Hamdan, H., et al. (2023). Partisipasi tokoh masyarakat dalam pembangunan di Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1.
- Hamzah, M. A., & Ariana, A. (2024). Kinerja pemerintahan desa (studi terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Turu Cinnae). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(4), 291. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i4.4445>
- Hidayatulloh, M. F., & Yani, M. T. (2021). Peran tokoh masyarakat dalam pembangunan desa
- Copyright (c) 2025 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

- Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10.
- Hutasoit, A., et al. (2024). Peran kepemimpinan lokal dalam pengambilan keputusan di Desa Marindal 1. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4.
- Kartina, M., & Idrus, I. I. (2023). Peran pemimpin nonformal dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kayuangan, Kecamatan Malunda, Sulawesi Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Riset Pembangunan*, 1.
- Lanur, V. S. C., & Martini, E. (2015). Pengembangan desa wisata Wae Rebo berdasarkan kearifan lokal. *Jurnal PLANESA*, 6(2).
- Mubyarto. (1991). *Kajian sosial ekonomi desa-desa perbatasan di Kalimantan Timur*. Aditya Media.
- Pujiningsih, S. (2019). The village development in village autonomy context based on community empowerment (the implementation of Act Number 6 of 2014 concerning villages). *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 19(2), 131. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v19i2.3121>
- Rijal, M. S., et al. (2021). Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan good village governace. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12), 3301. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i12.p20>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2001). *Perilaku organisasi: Organizational behavior*. Salemba Empat.
- Rohaedi, E., et al. (2019). Mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *Palar | Pakuan Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.33751/palar.v5i2.1192>
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2006). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soetomo. (2011). *Pembangunan masyarakat: Merangkai sebuah kerangka*. Pustaka Pelajar.
- Suparmini, S., et al. (2015). Pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.3180>
- Titaley, E., & Watloly, A. (2021). The cultural values of the island's indigenous people. *Sosiohumaniora*, 23(3), 313. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i3.28235>
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Elsam: HuMa.
- Yusuf, M., & Effendi, G. N. (2020). Ekstensi pemangku adat dalam pengambilan keputusan desa di Kerinci. *Tanah Pilih*, 1.